

## 55 Posbankum Desa/Kelurahan di Barru Kini Terbentuk, Wujud Kolaborasi Kanwil Kemenkum Sulsel dan Pemkab Barru



**Barru** — Sebanyak 55 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Kabupaten Barru resmi terbentuk sebagai hasil kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) dan Pemerintah Kabupaten Barru. Pembentukan Posbankum ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses keadilan serta pelayanan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Data terbaru ini diperoleh dari hasil koordinasi yang dilakukan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Heny Widyawati, bersama Bagian Hukum Pemkab Barru pada tanggal 26 Agustus 2025. Dari hasil pembahasan tersebut, jumlah posbankum yang semula hanya tersedia di 22 desa/kelurahan, kini meningkat signifikan menjadi 55 desa/kelurahan, atau mencapai 100 persen di seluruh Desa/Kelurahan Kabupaten Barru.

Posbankum Desa/Kelurahan berfungsi sebagai pusat layanan informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum awal bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu. Melalui Posbankum, masyarakat dapat memperoleh edukasi hukum, bantuan

dalam memahami hak dan kewajiban hukum, serta fasilitasi rujukan ke lembaga bantuan hukum apabila diperlukan.

Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menyebut capaian ini merupakan hasil kerja sama yang konsisten antara Kanwil Kemenkum Sulsel dengan Pemkab Barru.

“Terbentuknya 55 posbankum di seluruh desa dan kelurahan Barru adalah bukti nyata komitmen bersama untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Posbankum ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana konsultasi, tetapi juga menjadi pusat edukasi hukum bagi masyarakat di tingkat desa,” ungkap Heny.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, saat dikonfirmasi, Kamis (28/8/2025), memberikan apresiasi tinggi atas dukungan Pemkab Barru dalam memperluas cakupan posbankum. “Kami sangat mengapresiasi sinergi dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Barru, khususnya Bagian Hukum, yang memungkinkan terbentuknya 55 posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Kehadiran posbankum ini adalah langkah penting untuk memastikan akses keadilan merata bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” ujar Andi Basmal.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Barru melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah berperan sebagai koordinator pelaksanaan di daerah, memfasilitasi pembentukan Posbankum, melakukan pembinaan administrasi, serta menjadi penghubung antara desa/kelurahan dan Kanwil Kemenkum Sulsel.

Melalui pembentukan 55 Posbankum ini, Kanwil Kemenkum Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.